

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang biasa disebut sebagai bank Nagari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan bank Nagari dan Laporan Keuangan bank Nagari periode 2007-2013 yang terkait dengan penyaluran kredit dan *Net Interest Margin* (NIM).

##### **3.1.1 Gambaran Umum Bank Nagari**

Pada awal tahun enam puluhan baik Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh pengusaha swasta, sama-sama menyadari bahwa untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatera Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dilatar belakangi kesadaran tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 telah menghadap kepada Notaris Hasan Qalbi di Padang, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Soelamat Dipowardojo dan pihak swasta diwakili oleh Hadis Didong untuk mengukuhkan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Atas permintaan penghadap, Notaris Hasan Qalbi membuat akte No. 9 tertanggal 12 Maret 1962 sebagai dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan nama "PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH

SUMATERA BARAT". Pada tanggal 25 April 1962 oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia dikeluarkan izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat melalui Surat Keputusan No. BUM 9-44/11 sehingga mulailah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk melakukan usaha dengan kedudukan di Padang.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar hukum pendirian Bank Pembangunan Daerah harus diganti yaitu dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat baru dapat dipenuhi pada Tahun 1973, yaitu dengan keluarnya Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka akte Notaris Hasan Qalbi No. 9 tanggal 12 Maret 1962 tidak berlaku lagi dan PT. Bank Pembangunan Daerah dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada tahun 1967 keluar pula Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Dengan demikian UU No. 13 Tahun 1962 yang diundangkan lebih dahulu dari UU No. 14 Tahun 1967 harus tunduk kepada UU No. 14 Tahun 1967 sebagai Ketentuan Pokok-pokok Perbankan di Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1973 berikut dengan perubahan-perubahannya dirasakan tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 10 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No. 584.23-

432 tanggal 19 April 1986 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 6 tanggal 19 April 1986.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya transaksi luar negeri, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/60/KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Devisa. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, pada tahun 1992 diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 15 Tahun 1992 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No.584.23-407 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1993 No. 3 Seri D.1. Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 1992 tersebut, penyertaan modal bank dari pihak ketiga dimungkinkan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% modal disetor tetap merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat otonomi daerah dirasa perlu untuk meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi ke luar daerah Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 yang isinya antara lain tentang perubahan penyebutan/panggilan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari BPD Sumatera Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan modal dasar dari Rp.50 miliar menjadi Rp.150 miliar.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas 58 (PT) melalui Perda No. 3 Tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W3-00074 HT.01.01 TH.2007 tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari telah berstatus sebagai Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan Daerah pertama yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah. Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi *stakeholder*, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat.

Saat ini, Bank Nagari terus memperkuat tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik dan komitmen pada nasabah serta siap untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

### **3.1.2 Visi dan Misi Bank Nagari**

Visi bank Nagari menjadi bank pembangunan daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (bank Nagari) memiliki visi ke depan untuk dikenal dan menonjol di Indonesia, dengan visi tersebut Bank akan menjaga reputasi dan terus mengembangkan sayapnya.
2. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (bank Nagari) akan memelihara Kepercayaan dengan menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan



perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

Sedangkan misi bank Nagari adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya bank sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yaitu: turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang.

Bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat

- 1) Menjaga agar Bank bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat.
- 2) Memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham.
- 4) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

### 3.1.3 Logo Bank Nagari



**Gambar 3.1 Logo Bank Nagari**

**Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)**

Makna logo bank nagari adalah: bertemakan BUANA, sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (*sustainability*), Tanduk Kerbau, mengartikulasikan makna Minangkabau. Kedua persepsi tersebut dimaknai bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berlandaskan falsafah Minang yang secara konsisten menetapkan visi ke depan untuk terus berkembang ke arah global.

Untaian ikon berlian (*diamond*) yang berbentuk dua unsur segitiga dan satu bujursangkar “*sebagai tigo tali sapilin dan tigo tungku sajarangan*” selain itu juga dapat dipersepsi sebagai dasi kupu kupu yang menandakan profesionalisme dalam bisnis perbankan. Ikon berlian dapat interpretasi sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan ini menunjukkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah tradisi Minang sebagai landasan dalam menjalankan profesionalisme bisnis perbankan.

Tulisan Bank Nagari : memiliki tingkat keterbacaan tinggi secara psikologis merepresentasikan ketegasan

- Warna Biru : Menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi kedepan dengan dukungan teknologi informasi digital.
- Warna Merah : menyiratkan tentang semangat, progresifitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan.
- Warna Kuning : melambangkan keagungan “punya undang dan hukum”.
- Warna Hitam : melambangkan “*tahan tapo* dan mempunyai akal dan budi”.

#### **3.1.4 Kegiatan Usaha Bank Nagari**

Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1962 menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan Nasional. Dari pasal tersebut diketahui bahwa Bank Pembangunan Daerah menyandang suatu misi khusus yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan daerah terutama sekali melalui penyediaan dana bagi usaha-usaha pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni sebagai berikut:

1. Memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkannya
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan yang dinilai layak untuk dikembangkan melalui aktifitas penyertaan modal tersebut.

3. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.
4. Melakukan pemberian jasa perbankan lainnya seperti kiriman uang, inkasso, bank garansi, kliring, *safe deposit box* dan lain sebagainya.
5. Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.
6. Melakukan pengembangan sarana perbankan melalui pembukaan Kantor Cabang dan pembinaan *Lumbung Pitih Nagari* (LPN). Sesuai dengan ruang lingkup diatas, kegiatan-kegiatan operasional atau jenis-jenis produk dan jasa yang telah dilaksanakan oleh BPD Sumatera Barat sampai saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

- 1) Giro dalam Rupiah dan Valas
- 2) Tabanas BPD Sumatera Barat
- 3) Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA)
- 4) Deposito berjangka dalam Rupiah dan Valas
- 5) Sertifikat Deposito dalam Rupiah dan Valas
- 6) Simpanan *bajapauik*
- 7) Simpanan celengan
- 8) Dan lain-lainnya

2. Pemberian Kredit

- 1) Kredit Investasi
- 2) Kredit Modal Kerja
- 3) Kredit Uang Tunai
- 4) Kredit Rekening Koran



- 
- 5) Kredit Pemilikan Rumah
  - 6) Kredit Kapling Siap Bangun
  - 7) Kredit Pemilikan Kendaraan
  - 8) Kredit Usaha Tani
  - 9) Kredit Usaha Kecil
  - 10) Kredit Usaha Kecil Informal
  - 11) Kredit Profesi
  - 12) Kredit Kepada LPN
  - 13) Kredit Kepada Koperasi
  - 14) Kredit Eksport
  - 15) Kredit Komputer
  - 16) Kredit Alat-alat Elektronik
  - 17) Kredit Alat-alat Rumah Tangga
  - 18) Kredit Kepada Sarjana Pelopor Pembangunan Desa
  - 19) Kredit lainnya
3. Jasa-jasa Perbankan Lainnya
- 1) Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri
  - 2) Inkasso
  - 3) *Letter Of Credit*
  - 4) Bank Garansi
  - 5) Surat Keterangan Bank
  - 6) *Surety Bond*
  - 7) *Safe Deposit Box*
  - 8) Menerima Setoran PBB dan Pajak Negara lainnya

- 9) Menerima setoran iuran listrik, PAM, TV dan lain-lainnya.
- 10) Menerima setoran retribusi dan pajak daerah lainnya
- 11) Menerima Setoran Ongkos Naik Haji (ONH)
- 12) Melaksanakan pembayaran gaji/pensiunan pegawai daerah
- 13) Dan lain-lain jasa perbankan

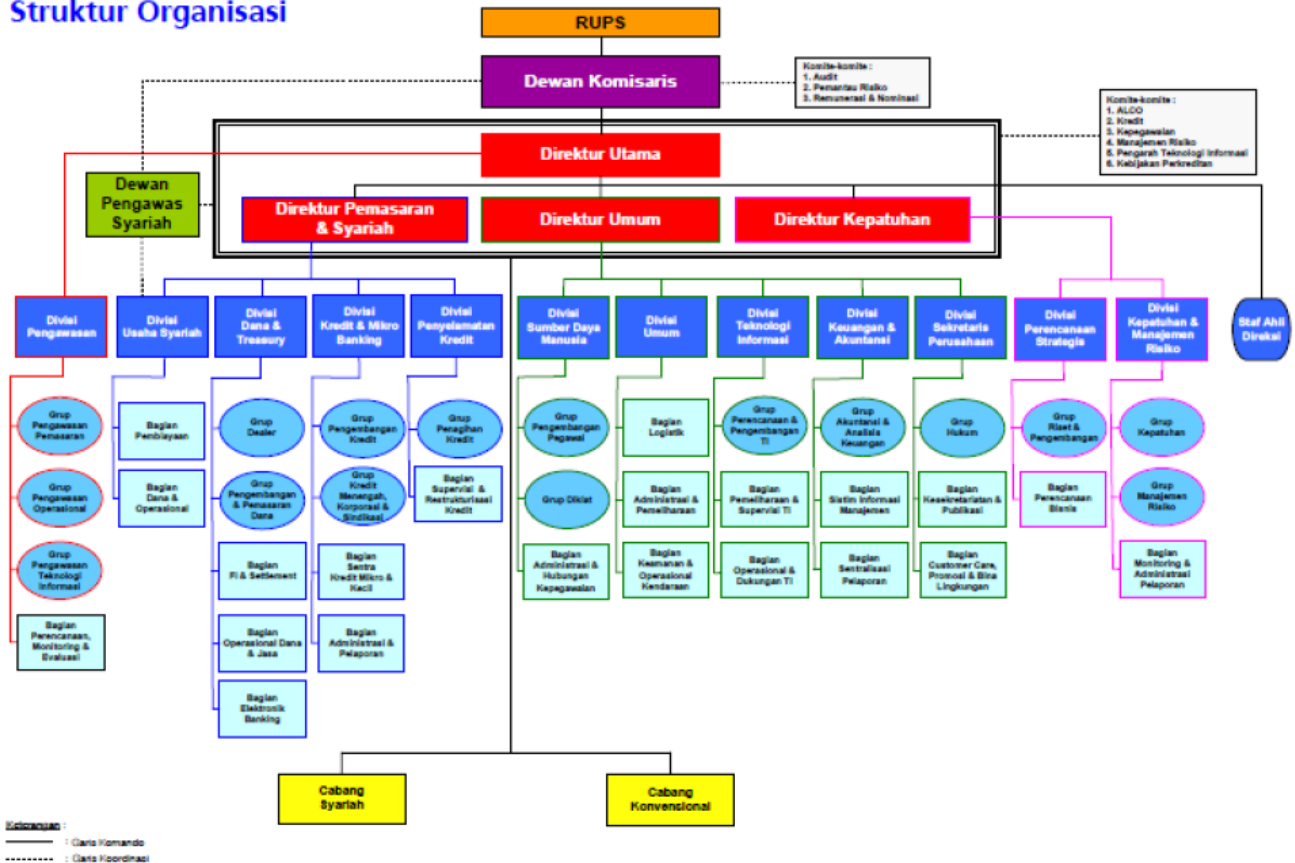
Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan operasional diatas juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan non operasional seperti sebagai berikut:

1. Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan personil / karyawan
2. Pengembangan organisasi Tata Kerja dan Administrasi
3. Modernisasi sarana dan pelengkapan kerja
4. Pemeliharaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan dan instansi lainnya.

### **3.1.5 Struktur Organisasi Bank Nagari**

Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan struktur organisasi yang jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab serta tugas divisi masing-masing. Struktur organisasi yang telah dibentuk diperlukan adanya kegiatan-kegiatan manajemen yang baik dan terarah, untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, atau yang akrab dipanggil sebagai bank nagari dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.

## Struktur Organisasi



**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bank Nagari**

**Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)**

Adapun tugas dan tanggung jawab dari beberapa struktur organisasi bank Nagari adalah:

### 1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS berada paling atas pada struktur organisasi perusahaan, biasanya diadakan setiap satu tahun sekali. Didalam rapat tersebut dewan direksi berkewajiban memberikan laporan perihal jalannya perusahaan mulai dari tata usaha keuangan dari tahun buku yang lalu yang harus ditentukan dan disetujui.

2. Dewan Komisaris

Tugas utama dewan direksi adalah mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dewan direksi memiliki sepuluh anggota dewan direksi yang terdiri dari satu orang sebagai komisaris utama, enam anggota komisaris yang terdiri dari satu orang sebagai komisaris utama, enam anggota komisaris dan tiga anggota komisaris independent yang tidak terafiliasi dengan direksi dan dewan komisaris atau pemegang saham pengendali.

3. Direktur Utama

Direktur utama bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun direksi dan diketahui Dewan Komisaris.

4. Direktur Kepatuhan

Direktur kepatuhan berperan aktif dalam mengantisipasi dan memotitor kepatuhan (*compliance*) terhadap berbagai ketentuan dan peraturan sebagai rambu-rambu kehati-hatian yang telah ditetapkan.

5. Komite Audit

Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

6. Komite Pemantau Risiko

Kegiatan komite pemantau risiko melakukan analisis, review dan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko, dalam rangka

mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dari hasil analisis, *review*, dan evaluasi, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan saran kepada Direksi dan persetujuan buku pedoman serta pemberian kredit kepada pihak terkait.

#### 7. Komite Remunerasi dan Nominasi

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi, Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Dan memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

### 3.2 Metode Penelitian

#### 3.2.1 Metode yang Digunakan

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2012:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.



Menurut Sugiyono (2012:147) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antar variabel suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik.

Sesuai dengan uraian diatas, maka penelitian menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari laporan keuangan bank, dan laporan tahunan bank yang terkait perkembangan penyaluran kredit dan *Net Interest Margin* (NIM) pada bank Nagari periode 2007-2013. Sedangkan metode verifikatif yaitu untuk menguji lebih dalam mengenai pengaruh penyaluran kredit terhadap *Net Interest Margin* (NIM).

### **3.2.2 Operasional Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:59), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pada permasalahan dan hipotesis yang akan diuji, operasionalisasi variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Variabel bebas (*Variable Independent*)**

Variabel bebas atau *Variable independent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel terikat (*dependent*) oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen atau variabel bebasnya adalah penyaluran kredit (Sugiyono, 2012:39)

## 2. Variabel terikat (*Variable Dependent*)

Variabel terikat atau *variabel dependent* adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas atau *variable independent*. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah *Net interest Margin* (NIM) (Sugiyono, 2012:39).

**Tabel 3.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
Variabel independen (X) Penyaluran kredit	Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012:82).	Perkembangan penyaluran kredit periode 2007-2013	Rasio
Variabel dependen (Y) <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	<i>Net Interest Margin</i> (NIM) merupakan besarnya pendapatan bunga bersih terhadap penempatan aktiva produktif Menurut (Taswan, 2008:167).	Perkembangan <i>Net Interest Margin</i> (NIM) periode 2007-2013	Rasio

### **3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel**

#### **3.2.3.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2012:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan bank Nagari yang terkait dengan penyaluran kredit dan *Net Interest Margin* (NIM).

#### **3.2.3.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel sesuai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan penyaluran kredit periode 2007-2013.
2. Data pada laporan keuangan yang berhubungan dengan *Net Interest Margin* (NIM) periode 2007-2013.

#### **3.2.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2012:401) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip-arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank Nagari periode 2007-2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mencari data yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder, data tersebut diperoleh dari website bank Nagari.

### **3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis**

#### **3.2.5.1 Analisis Persamaan Regresi Linear**

Analisis regresi linear digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2011:260).

Bentuk persamaan regresi linear adalah :

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

X = Variabel bebas atau *independent* (penyaluran kredit)

Y = Variabel terikat atau *dependent* (NIM)

a = Konstanta regresi

b = Koefisien regresi

#### **3.2.5.2 Analisis Koefisien Korelasi**

Menurut Sugiyono (2011:228) koefisien korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Independen atau variabel bebas (X) dengan variabel dependen atau variabel terikat (Y) secara

bersama-sama dan untuk mengukur seberapa besar variasi perubahan variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat.

Untuk penghitungannya menggunakan rumus korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan Rumus:

r : Nilai koefisien korelasi

$\sum X$  : Jumlah pengamatan variabel X (penyaluran kredit)

$\sum Y$  : Jumlah pengamatan variabel Y (NIM)

$\sum XY$  : Jumlah hasil perkalian X dan Y

$\sum X^2$  : Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X (penyaluran kredit)

$(\sum X)^2$  : Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X (penyaluran kredit)

$\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y (NIM)

$(\sum Y)^2$  : Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y (NIM)

N : Jumlah pasangan pengamatan X dan Y



**Tabel 3.2**

**Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,100	Sangat Kuat

**Sumber: Sugiyono (2011:231)**

**3.2.5.3 Analisis Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar variabel terikat (NIM) mempengaruhi variabel bebasnya (penyaluran kredit) (Sugiyono, 2009:231). Untuk mengetahui hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan Rumus

Kd : Koefisien determinasi

$r^2$  : Koefisien korelasi dikuadratkan

### 3.2.5.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui secara signifikan pengaruh dari variabel Independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Untuk menguji rumusan Hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Penyaluran kredit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Net Interest Margin* (NIM).

$H_a$  : Penyaluran kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Net Interest Margin* (NIM).

Dalam menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan  $df=(n-k-1)$ , dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel. Untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui koefisien korelasi signifikan atau tidak, maka dapat digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Menurut keputusan terhadap hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

1. Jika nilai  $t_{tabel} > \text{nilai } t_{hitung}$  dan  $-t_{hitung} < \text{nilai } -t_{tabel}$  maka Hipotesis Nol ( $H_0$ ) ditolak.
2. Jika nilai  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka Hipotesis Nol ( $H_0$ ) diterima.

Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga  $t_{hitung}$  tersebut dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ , untuk melihat harga  $t_{tabel}$  maka didasarkan pada (dk) derajat kebebasan yang besarnya adalah n-2 dengan taraf kesalahan ( $\alpha$ ) ditetapkan 0,05 (5%).